

Received: May 9, 2024
Accepted: June 9, 2024
Published: June 16, 2024

**RELEVANSI FEMINISME DALAM ISU KONTEMPORER:
KEHADIRAN UN WOMEN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MANUSIA DI AFGHANISTAN**

***Ali Zhafir Talmullah¹, Nurmasari Situmeang², Asep Kamaluddin Nasir³**
Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta^{1,2,3}
*E-mail: alizt@upnvj.ac.id

Abstract

Feminism is still an important issue in international relations. Especially in the field of non-traditional security. The issue of women's role in life is still being fought today. These include discrimination against women and criminal issues such as human trafficking and exploitation of women. Another issue that needs special attention is the limited involvement of women in building the country. One country that is still of particular concern to the role of women is Afghanistan. For some countries, Afghanistan has rules that do not support the roles of women so that the struggle for the development of human resources, especially women in Afghanistan, is still ongoing. UN Women is present in the country to empower women and humans in Afghanistan to encourage the role of women in building their nation. The framework of this paper uses feminism to describe the phenomenon that occurred in the country and see its relevance to current issues. In fact, there are still many things that threaten human life, especially women, which should be the focus for UN Women to solve these problems.

Keywords: Feminism, Non-Traditional Security, UN Women

Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi memberikan dampak baik bagi seluruh masyarakat dunia. Kemudahan akses dalam bidang apapun tidak sulit untuk didapatkan. Beberapa bidang tersebut diantara lain akses mendapatkan kesehatan, pendidikan serta kebebasan berekspresi. Era baru yang dirasakan saat ini telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap negara melakukan efektifitas kegiatan melalui peran yang dimiliki teknologi saat ini. Setiap masyarakat diharapkan mampu bersaing secara sehat melalui kemampuan berpikir dan mengembangkan ide. Tetapi upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara simultan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh setiap negara dunia.

Namun demikian, disamping maju dan berkembangnya peradaban, masih ada sebagian negara yang kurang peka terhadap kemudahan dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender apapun. Karena kuatnya sebuah negara dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat produktif yang ada pada negara tersebut terlepas dari gender yang mereka miliki. Permasalahan gender merupakan suatu hal penting yang cukup banyak diabaikan. Masih banyak masyarakat dunia yang menganggap perempuan sebagai makhluk rendah yang

tidak dapat menghasilkan seperti laki-laki. Bahkan di beberapa negara perempuan dianggap sebagai beban keluarga.

Ini berkaitan dengan permasalahan keamanan non tradisional. Masalah keamanan non-tradisional menghadirkan tantangan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara, sebagian besar diakibatkan oleh penyebab non-militer seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, penyakit menular, bencana alam, migrasi ilegal, kekurangan pangan, dll. . . penyelundupan manusia, perdagangan narkoba dan kejahatan internasional. Bahaya ini seringkali melintasi batas, tidak dapat diselesaikan secara sepihak dan membutuhkan tanggapan yang komprehensif - politik, ekonomi, sosial - serta penggunaan kekuatan militer untuk kemanusiaan (Caballero & Anthony, 2016). Maka kemudian masalah feminisme merupakan salah satu masalah non tradisional yang mengancam kehidupan manusia.

Di beberapa negara dunia juga masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kejahatan demi kejahatan terus berlangsung hingga pada akhirnya perempuan kurang merasa nyaman dan tidak memiliki ruang aman untuk bebas berpikir dan berekspresi. Fokus penulis pada tulisan ini ialah pada

negara Afghanistan. Negara yang dikaruniai tuhan banyak sumber daya alam. Namun, sikap kesukuan dan aturan konvensional masih diterapkan di tanah tersebut. Bahkan perempuan sedikit diberikan kesempatan untuk bebas dan mudah dalam mengakses bidang-bidang penting dalam negara. Perempuan sangat minim melek huruf yang ditandai kurang dari 20 persen saja.

Di bangku pemerintahan khususnya di lembaga-lembaga utama di dominasi oleh kaum laki-laki. Aturan-aturan konvensional yang diciptakan tidak terlalu banyak memberikan efek baik pada perempuan. Beberapa pihak menyayangkan hal tersebut karena tidak melindungi serta mencegah diskriminasi yang ada. Permasalahan tersebut semakin memprihatinkan karena mengancam keselamatan kaum perempuan dan mengancam hak hidup perempuan sehingga hal tersebut menjadi masalah keamanan bersama khususnya bagi kaum perempuan. Penting bagi seluruh pihak dunia maupun nasional negara tersebut memperjuangkan hak-hak dasar perempuan. Sehingga tanah tersebut menjadi tanah berkah dan maju.

Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai latar belakang hadirnya UN Women di Afghanistan sebagai upaya mempromosikan nilai-nilai kesetaraan

gender di Afghanistan. UN Women memiliki jawaban atas respon terhadap kekerasan dan diskriminasi yang ada di tanah tersebut. Organisasi tersebut hadir untuk melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap masyarakat Afghanistan. Pada akhirnya, dengan hadirnya UN Women dapat sedikit mengikis pertikaian dan kejahatan yang dialami perempuan di tanah tersebut.

A. Kerangka Teoritik

Permasalahan gender atau *gender issue* menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas sejak beberapa dekade terakhir. Gender merujuk pada perilaku dan harapan yang dipelajari secara social yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas (Peterson dan Runyan, 1995). Banyak feminis terinspirasi oleh post-strukturalisme karena mereka kritis terhadap cara konvensional para ilmuwan Hubungan Internasional (IR) mempelajari politik dunia. Pendekatan konvensional mengandung pemikiran yang berorientasi gender; kritik feminis menunjukkan bahwa gagasan keamanan realis, misalnya, adalah cara pandang maskulin terhadap dunia. Keamanan realis didasarkan pada pertahanan militer negara-negara dalam anarki internasional; tetapi hal itu menyembunyikan keberadaan hierarki gender dalam politik dunia dalam arti bahwa perlindungan dari ancaman luar

juga melindungi yurisdiksi domestik yang mendukung subordinasi perempuan yang terus berlangsung (Sylvester, 1994). Laura Sjoberg telah menerapkan perspektif gender pada perang di Irak (Sjoberg, 2016). Dalam konteks ini, perempuan secara formal menikmati status sebagai pihak yang dilindungi; mereka adalah warga sipil yang tidak terlibat. Namun, alih-alih keamanan, situasi ini menyebabkan kekerasan berbasis gender karena tidak ada perhatian terhadap perlindungan nyata bagi Perempuan (Jackson & Sorensen, 2013).

Menurut Viotti dan Kauppi (Viotti & Kauppi, 2018), pandangan dasar feminisme menekankan pentingnya "gender". Mereka berargumen bahwa gender tidak hanya memainkan peran signifikan di dalam rumah tangga tetapi juga dalam politik internasional. Viotti dan Kauppi menunjukkan bahwa teori-teori besar sering kali gagal mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan individu. Selain itu, teori-teori seperti realisme dan liberalisme cenderung mengabaikan ketimpangan gender yang muncul dari budaya patriarki. Feminisme mengusulkan bahwa penghapusan ketimpangan gender, yang sering kali diabaikan oleh paradigma besar seperti realisme, merupakan tujuan utama dalam mempromosikan emansipasi perempuan. Pendekatan feminisme juga

sering menolak metodologi positivisme, memilih pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh konteks budaya, sejarah, dan konstruksi social (Ramadhan & Ma'sumah, MENGKAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASANTERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAANGENDER MELALUI PERSPEKTIF FEMINISME, 2018).

UN Women adalah organisasi yang sangat mengutamakan peran dan kepentingan perempuan, sehingga paradigma feminisme sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis di dalam tulisan ini. Feminisme adalah pendekatan yang berfokus pada ketidaksetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta konsekuensi ketidaksetaraan tersebut terhadap politik dunia (Jackson & Sorensen, 2013). Ketergantungan pada kontrol laki-laki terhadap perempuan menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan ini mempengaruhi politik dunia. Selain itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada definisi konvensional tentang "maskulinitas" dan "feminitas" yang secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Jackson & Sorensen, 2013).

Sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender, UN Women memiliki fokus pada lima bidang prioritas. Prioritas UN Women di antaranya untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam kegiatan keamanan dunia. Fokus melibatkan perempuan dalam semua aspek proses perdamaian dan keamanan, karena perempuan sering menjadi korban konflik dan perang. Oleh karena itu, UN Women ingin melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik (Ramadhan & Ma'sumah, MENGAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASANTERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAANGENDER MELALUI PERSPEKTIF FEMINISME, 2018).

Peran UN Women di Afghanistan

UN Women awalnya didirikan di Afghanistan sebagai UNIFEM pada tahun 2002. Organisasi ini kemudian bertransformasi menjadi UN Women pada tahun 2010, dengan Kantor Negara Terbesar (UN Women Afghanistan Country Office selanjutnya disebut ACO) berada di Afghanistan. ACO beroperasi dalam kerangka prioritas strategis global UN Women serta Kerangka Bantuan Pembangunan PBB untuk Afghanistan

(UN Development Assistance Framework) dan kerangka nasional Strategi Pembangunan Nasional Afghanistan (Afghanistan National Development Strategy), Program Pemulihan Nasional (National Priority Programmes), dan Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan (National Action Plan for the Women of Afghanistan), didukung oleh Kerangka Akuntabilitas Bersama Tokyo (Tokyo – Mutual Accountability Framework).

UN Women sejak awal telah bekerja erat dengan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga PBB lainnya, dan donor-donor dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mereka telah mendukung pengembangan, pemantauan, dan implementasi kebijakan yang melindungi serta mempromosikan hak-hak perempuan. Ini termasuk pengembangan NAPWA, pengadopsian kuota perempuan dalam Konstitusi nasional, serta undang-undang dan kebijakan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan gadis-gadis di tingkat nasional dan lokal. UN Women juga memasukkan perspektif gender dalam ANDS. Dapat dikatakan bahwa UN Women telah berkontribusi pada hampir setiap perlindungan hukum utama yang kini diberikan kepada perempuan di Afghanistan sejak tahun 2001.

Dalam Tim Negara PBB untuk Kerangka Bantuan Pembangunan PBB untuk Afghanistan (2010-2013), ACO bekerja utamanya untuk mendukung Area Prioritas 1 (Tata Kelola Baik, Perdamaian, dan Stabilitas) dan Area Prioritas 2 (Penghidupan Berkelanjutan: Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Peluang Pendapatan). Sebagai tingkat ketiga dan tertinggi dalam hierarki kerangka dan prioritas, Rencana Strategis Global UN Women 2014-17 menyediakan enam prioritas program sebagai berikut: (UN Women Development Results Narrative 2014-2017)

1. Perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkat.
2. Perempuan, terutama yang paling miskin dan terpinggirkan, diberdayakan secara ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.
3. Perempuan dan gadis hidup bebas dari kekerasan.
4. Perdamaian, keamanan, dan tindakan kemanusiaan dibentuk oleh kepemimpinan dan partisipasi perempuan.
5. Tata kelola dan perencanaan nasional sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban terhadap

komitmen dan prioritas kesetaraan gender.

6. Sebuah kumpulan norma, kebijakan, dan standar global yang komprehensif dan dinamis mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah ada dan diterapkan melalui tindakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkat.

Kian hari isu keamanan menjadi menarik di bahas. Pasalnya isu tersebut meningkat setiap tahunnya yang ditunjukkan oleh banyaknya ancaman keamanan di setiap bidang di negara-negara dunia. Hal tersebut mendefinisikan bahwa keamanan merupakan isu penting bagi kehidupan manusia. Keamanan diartikan sebagai situasi saat seringnya peristiwa-peristiwa kriminal terjadi dan mengancam umat manusia (William, 2008). Hal tersebut berkaitan dengan ancaman yang dialami banyak perempuan dunia. Kekhawatiran perempuan akan adanya ancaman mereka di bidang politik mengakibatkan lahirnya pemikiran feminisme. Penulis menegaskan bahwa isu keamanan bergeser dari ancaman tradisional menjadi ancaman gender. Menilik lebih lanjut, Tickner dalam

jurnalnya berargumen bahwa feminisme merupakan teori yang ingin mendorong peran perempuan dalam segala aspek dan memiliki tujuan untuk mengakhiri subordinasi perempuan. Ia meyakini bahwa perempuan sering dirugikan oleh laki-laki. Teori ini berangkat dari latar belakang ketidaksetaraan relasi kuasa yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki. Keyakinan mereka akan adanya ketidakadilan dan penindasan dari kaum laki-laki mendorong mereka untuk memberikan pemahaman agar terjadi transformasi. Feminisme memiliki harapan akan adanya transformasi tatanan sosial lebih baik dari sebelumnya. (Tickner, 2011).

B. Feminisme sebagai Ujung Tombak Perjuangan dan Perlindungan Perempuan melalui UN Women

Feminisme sebagai ujung tombak perjuangan serta perlindungan terhadap perempuan di kancah internasional diperkuat oleh argumentasi Tickner. Ia berargumen bahwa ada keterkaitan feminisme dengan Hubungan Internasional, Namun, (Peterson, 1998) dalam jurnalnya mengatakan sebaliknya bahwa Hubungan Internasional tidak mengakui adanya intervensi feminisme dalam bidang

tersebut. Ketiadaan feminisme ditandai oleh dominasi laki-laki dalam kebijakan nasional dan konstruksi maskulinitas yaitu kekuasaan negara, keamanan nasional, kedaulatan dan kekuatan militer. Parameter-parameter tersebut menjelaskan tentang Hubungan Internasional merupakan tantangan besar bagi feminisme. Encloe dalam Jurnal Tickner memberikan pertanyaan terkait keseriusan Hubungan Internasional dalam mengakui perempuan sebagai objek penting di segala aspek internasional. Pertanyaan tersebut meliputi seberapa besar pengaruh perempuan berdasarkan jabatannya yaitu sekretaris, diplomat maupun istri diplomat. Relevansi kedudukan tersebut menjadi pertanyaan tentang kapasitas mereka bagi kaum perempuan di dunia internasional (Tickner, 2011). Maka bagi tickner memang ada keterkaitan antara feminisme dengan Hubungan Internasional. Tetapi feminisme memiliki tantangan besar maskulinitas dalam melakukan kontribusi pada bidang-bidang Hubungan Internasional.

Keyakinan akan adanya dominasi laki-laki dalam setiap kebijakan dan interaksi politik global memberikan

gambaran bahwa terdapat maskulinitas dalam pelaksanaan Hubungan Internasional. Bagi penulis, maskulinitas secara sempit diartikan sebagai sifat kelaki-lakian seseorang. Sifat maskulinitas seseorang tidak terbatas dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sifat maskulinitas. Bahkan, sistem negara berdasarkan kekuatan juga menunjukkan bentuk-bentuk maskulin. Argumen lain menjelaskan maskulinitas dianggap sebagai ancaman bagi feminisme. Di mana dalam Hubungan Internasional di dominasi kelompok laki-laki serta perang dan hegemoni menjadi landasan dari penindasan laki-laki terhadap perempuan. Alih-alih untuk melindungi, tetapi perang yang dilakukan sangat berdampak pada kematian perempuan dan anak-anak.

Maskulinitas merupakan kajian menarik untuk menjadi fokus bahasan Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan Hubungan Internasional dikenal sebagai kajian yang maskulin, keras, brutal akibat dari fokusnya pada proyeksi kekuatan dan negara sebagai aktor utama (Mulya & Soetjipto, 2021). Maskulin seringkali di lekatkan pada hubungan internasional dan laki-laki yang juga dikaitkan dalam

kehidupan sehari-hari. Peran laki-laki tersebut juga dilihat berdasarkan kriteria maskulin yaitu kuat, berjiwa kepemimpinan, agresif dan atletis. Sebaliknya, laki-laki yang tidak memiliki aspek tersebut akan dikatakan sebagai laki-laki subordinat. Maka, dengan hal tersebut. Dapat ditarik argumentasi bahwa feminisme merupakan gagasan untuk menyetarakan gender atau peran perempuan pada kajian-kajian Hubungan Internasional dan keamanan. Feminisme bahkan tidak hanya fokus pada kesetaraan gender antara peran perempuan dan laki-laki tetapi juga memperjuangkan kesetaraan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Feminisme dan Maskulinitas menjadi penting untuk dibahas karena sifat tersebut tidak memandang jenis kelamin. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, seluruh jenis kelamin bisa memiliki sifat maskulin.

Feminisme memiliki sisi berbeda dari maskulinitas. Feminisme menitikberatkan pada peran gender yang tidak terbatas dari rumah tangga namun lebih daripada itu. Peran gender harus dilakukan di kancah internasional (Ramadhan & Ma'sumah, MENGAJI PERAN UN WOMEN

DALAM MENGATASI
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN
MEWUJUDKAN KESETARAAN
GENDER MELALUI PERSPEKTIF
FEMINISME, 2018). Sementara,
(Martin, 2021) memiliki argumen sama
bahwa kalangan feminis sudah bekerja
dalam memikirkan masalah keamanan.
Feminis memiliki pemikiran bahwa
keamanan individu harus
diprioritaskan, keamanan negara
ditekankan oleh kalangan tradisionalis
yang maskulin.

Memasuki abad 21, tatanan sosial
dunia mengalami pergeseran. Laki-laki
tidak lagi menjadi kekuatan utama dari
proses interaksi politik antarnegara.
Kekuatan politik selalu melibatkan
perempuan. Kemudian, hadirnya UN
Women menjadi titik kekuatan
perempuan. UN Women merupakan
badan yang berdiri di bawah naungan
PBB dengan menekankan pada konsep
kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan. Selain itu, PBB
merupakan badan internasional
mencakup beberapa konsep dan fokus
keamanan yang menitikberatkan
konteks keamanan militer menuju
keamanan pembangunan dan
keamanan manusia. Keamanan tersebut
meliputi ekonomi, pangan, kesehatan

lingkungan, sosial, individu serta
keamanan politik.

Berdasarkan argumentasi utama
bahwa keamanan merupakan salah satu
hasil dari proses interaksi politik yang
mengancam umat manusia. Dalam hal
ini, penulis berargumentasi bahwa
keamanan perempuan dalam berpolitik
terancam sejak awal Hubungan
Internasional berdiri. Namun, saat ini
di tahun-tahun 2000. Keadaan tersebut
bergeser, artinya bukan berarti peran
laki-laki tidak dianggap sedikitpun.
Tetapi, kesetaraan semakin terlihat
karena banyaknya keterlibatan
perempuan dalam beberapa kebijakan
dunia dan kontribusi perempuan pada
proses interaksi politik dunia. Saat ini,
banyak perempuan juga turut menjadi
aktor yang berpengaruh pada
perubahan dunia bahkan menjadi
pemimpin di suatu negara. Jabatan
strategis juga tidak luput dari
kehadiran perempuan di dalamnya. UN
Women didirikan untuk
mendedikasikan pada pemberdayaan
perempuan dan mendorong perempuan
pada posisi-posisi strategis serta
memitigasi ancaman terhadap referent
object.

Upaya perempuan untuk terus
mengkampanyekan nilai feminisme
pada isu kontemporer dan memperluas

makna feminis yang tidak terbatas pada gender melainkan bentuk hegemoni negara dan fokus utama pada kekuatan menjadikan feminisme sebagai teori yang relevan untuk membahas isu kontemporer. Penulis meyakini bahwa feminisme akan menjadi penyeimbang dari maskulinitas yang mayoritas di dominasi oleh kelompok laki-laki. Feminisme mampu memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dengan membentuk badan internasional UN Women sebagai payung bagi keamanan perempuan. Kemudian, dalam hal ini feminisme mampu menjelaskan posisi mereka sebagai korban dari maskulinitas yang berdalih bahwa mereka akan melindungi, tetapi pada kenyataannya perempuan dan anak-anak menjadi korban terbanyak dari setiap perang.

Maskulinitas hanya berfokus pada sifat hegemonik dari laki-laki dan menitikberatkan pada kekuatan. Hal tersebut akan melahirkan problematika. Kemudian, maskulinitas hanya bersifat praktis terhadap kaum laki-laki serta mereka yang memiliki hak istimewa lainnya. Maka kemudian, maskulinitas dinilai tidak relevan untuk dijadikan sebagai alat analisa proses interaksi politik dunia. Berbeda dengan

Feminisme teori tersebut menjadi relevan untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi kaum perempuan dan orang-orang yang tertindas. Sehingga, teori tersebut relevan dalam membahas situasi terkini dalam melihat perkembangan serta tingkat keamanan manusia yang terancam akibat keputusan laki-laki dan perempuan maskulin yang hanya bertumpu pada kekuatan. Penulis meyakini bahwa perang tradisional yang terjadi di timur tengah diakibatkan dari maskulinitas yang ada di wilayah tersebut.

Maka melalui UN Women yang didirikan pada tahun 2010 oleh Majelis Umum PBB menghadirkan banyak program untuk akselerasi dari kesetaraan gender di dunia global dan guna untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengakomodir hak-hak dari perempuan untuk memaksimalkan potensi dalam penetapan standar global di bidang kesetaraan gender. Dalam memaksimalkan hal tersebut, UN Women mengendalikan programnya melalui beberapa tujuan utama yakni memberikan dukungan normatif terhadap sistem koordinasi dan aktivitas PBB dalam aksi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi negara-negara

anggota. UN Women juga diharapkan menjadi wadah untuk advokasi dan menjalin kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan dan anak sebagai perhatian atau fokus utama dunia serta mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan (Nurfahirah A. , Dewi, Yulinda, & Dini, 2022).

C. Implementasi Kesetaraan Gender serta Upaya UN Women di Afghanistan

Urgensi pembahasan tentang diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan merupakan era di mana negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan. Menariknya ialah krisis kemanusiaan tersebut paling banyak dialami kaum perempuan. Krisis tersebut ditandai dari kurangnya kebebasan yang diberikan terhadap kaum perempuan. Kebebasan tersebut meliputi akses pada kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan. Bahkan negara tersebut merupakan negara yang tidak ramah terhadap perempuan karena banyaknya terjadi pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan juga transaksi perdagangan perempuan. (Septiadi, 2019).

Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban memiliki kebijakan-kebijakan yang bertentangan

dengan nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Bagi feminisme liberal, apa yang terjadi di afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban merupakan pembatasan hak-hak perempuan di tanah tersebut. Sebelum masuk pada peran UN WOMEN, Afghanistan sebelumnya memiliki aturan-aturan undang-undang yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung kesetaraan gender. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-undang tahun 1990 Bab 3 pasal 38. Isinya mengandung tentang hak-hak perempuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terlepas dari golongan, ras, Bahasa, suku dan pendidikan. Tetapi Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi tersebut diperkuat oleh Taliban. Adapun diskriminasi yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. (Nurfahirah, Dewi, & Gustiana, Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan, 2022).

Di sektor pendidikan tahun 2002, PBB mengatakan bahwa di afghanistan hanya ada 17 persen perempuan yang

bisa mengenali huruf. Hal tersebut merupakan buntut dari permasalahan pembatasan hak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan sehingga banyak perempuan disana mengalami buta huruf. Afghanistan hanya memiliki 14 persen wanita terbentuk, dimana 4-5 persen adalah perempuan desa yang bisa membaca. Ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pengetahuan yang tinggi mungkin di masyarakat Afganistan. Maka, kesetaraan hak akses perempuan dan untuk mengimplementasikan Undang-undang kesetaraan di Afghanistan perlu perjuangan melalui beberapa organisasi. Sedangkan di sektor lain seperti kesehatan dan sosial, perempuan disana tidak mendapatkan akses yang baik. Banyak pembatasan-pembatasan regulasi yang diberikan pemerintah.

Menjawab permasalahan tersebut, UN Women hadir untuk Afghanistan melalui kerja sama yang dilakukan sejak tahun 2010. Fokus yang menjadi penting bagi UN Women ialah kekerasan yang terjadi di Afghanistan pada kaum perempuan. Beberapa program yang diberikan UN Women diantara lain fokus pada bagaimana langkah pencegahan dan perlindungan

terhadap perempuan. UN Women memberikan prioritas nasional di Afghanistan atas dasar krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah tersebut. Tantangan tersebut di respon UN Women melalui kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi. (Rumadul, 2017). UN Women didirikan untuk mengatasi tantangan internal di Afghanistan serta mempromosikan kesetaraan gender hingga seluruh dunia.

UN Women ingin membuka pikiran masyarakat di Afghanistan tentang pentingnya keberadaan perempuan sebagai manusia yang berhak mendapatkan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Organisasi tersebut berangkat akibat tingkat diskriminasi semakin tinggi di tanah tersebut. Afghanistan merupakan negara dengan kaum laki-laki yang patriarki. Banyak dari pejabat di Lembaga utama diduduki oleh laki-laki berdasarkan aturan-aturan kesukuan yang sudah usung. Sistem patriarki tersebut bahkan menyentuh ranah keluarga di mana beberapa keluarga meyakini bahwa perempuan tidak seperti laki-laki yang memberikan penghasilan. Hingga pada akhirnya perempuan dianggap sebagai beban.

Pada akhirnya, UN Women sebagai Lembaga internasional hadir untuk memberikan bantuan dan dukungan baik secara dana maupun moral pada perempuan-perempuan Afghanistan agar lebih dihargai dan dianggap keberadaannya. UN Women sebagai Lembaga internasional memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan gender di Afghanistan. Salah satu strategi tersebut melalui pembangunan Non-Governmental Organisation bernama Small Scale, Self-Reliant Local Development. Strategi itu difokuskan pada kapasitas dari NGO dalam pembangunan serta pengembangan daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui kegiatan-kegiatan lokal mereka. Pada strategi ini, diharapkan menjadi strategi yang berkelanjutan. Karena perhatiannya juga terhadap keberlanjutan maka konsep ini memiliki sifat pembangunan yang sering disebut sebagai strategi pembangunan masyarakat. (Septiadi, 2019).

Pada strategi tersebut memiliki berbagai bentuk proyek atau pembangunan program-program untuk membangun masyarakat. (Septiadi, 2019). Pembangunan tersebut di bagi

di beberapa bidang seperti kesehatan, praktik pertanian, pembangunan infrastruktur lokal serta kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat lainnya. Di bidang kesehatan, ada program kesehatan dan kesejahteraan yang berfungsi untuk mempromosikan perempuan di Afghanistan pada penyedia layanan kesehatan setempat yang diharapkan bisa mendorong akses kesehatan lebih mudah. (Rumadul, 2017).

Program tersebut mengulas kembali kurikulum kesehatan dan daftar rujukan perawatan kesehatan. Hal tersebut guna memberikan perempuan informasi yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan. Program tersebut juga meliputi penyelenggaraan pelatihan untuk bidan. Tak hanya itu, program ini juga ingin meningkatkan kualitas kesehatan melalui skrining medis dan konseling kesehatan. Kemudian, bagi perempuan yang dinyatakan positif HIV/AIDS dipantau untuk pengobatan dan dirujuk ke pusat kesehatan di mana mereka dapat menerima obat dan terapi antiretroviral.

Kemudian program lain yang dilakukan UN Women ialah melalui program mempengaruhi serta membuat keputusan. Pada program tersebut

perempuan Afghanistan diberikan layanan belajar untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai perempuan serta pentingnya kesetaraan gender dan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan. Selain itu juga dibahas mengenai kekerasan-kekerasan yang terjadi pada perempuan untuk memunculkan kesadaran bahwa perempuan harus bergerak menuju ruang aman dan nyaman. Pada program ini juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berdiri dalam mengupayakan perdamaian serta membantu mereka mengembangkan potensi kepemimpinan, komunikasi dan keterampilan. Program ini juga diharapkan dapat mengubah kebijakan pemerintah untuk lebih ketat mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan keamanan bagi perempuan dan anak melalui media. (Rumadul, 2017).

Upaya-upaya di atas dilakukan untuk menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dibuat untuk memberi kuasa pada masyarakat tepatnya pada kaum perempuan yang menjadi objek ketidakadilan bagi kaum laki-laki. Secara luas, strategi pembangunan memusatkan pada pendidikan. Mereka

ingin membangun sumber daya manusia dan berasumsi bahwa masalah dari pembangunan berasal dari kurangnya keterampilan dan kekuatan individu yang diperlukan. Strategi pembangunan mencakup pembangunan yang implisit. Strategi tersebut memberikan asumsi bahwa pokok permasalahannya ialah kelambanan lokal yang diakibatkan oleh isolasi, tradisi dan kekurangan akses pendidikan dan kesehatan. Maka kemudian, program-program sebelumnya dibahas untuk memberikan bukti bahwa telah terjadi perubahan dan ada keinginan bersama untuk memperbaiki sistem perlindungan dan pencegahan di Afghanistan.

Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, kelambanan tersebut dapat dihentikan melalui intervensi badan-badan luar termasuk Lembaga internasional untuk membantu menyadarkan masyarakat mengenai potensi yang dimiliki melalui pendidikan, pengenalan teknologi, organisasi serta peningkatan-peningkatan kesadaran lainnya. Maka masuknya UN Women merupakan langkah tepat melalui kerja sama yang dibangun sejak tahun 2010 tersebut. Upaya melalui strategi pembangunan

juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat di luar periode pembangunan yang telah dibangun. Tetapi, seringkali proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi layanan pemerintah kurang di mana strategi pengembangan masyarakat ini bekerja. (Rumadul, 2017).

Langkah lain yang dilakukan UN Women dalam mengatasi kekerasan yaitu membangun lembaga edukasi serta kurikulum yang menggandeng World Association of Girl Guides and Scouts. Pengembangan tersebut juga menargetkan perempuan dengan rentang usia 5 hingga 25 tahun. Lembaga tersebut diselenggarakan dengan cara menggandeng beberapa negara di lingkup regionalnya yang selanjutnya akan dilakukan advokasi terkait dengan jenis-jenis kekerasan apa saja yang terjadi serta sering dialami perempuan (Ramadhan & Ma'sumah, MENGAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASANTERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAANGENDERMELALUI PERSPEKTIF FEMINISME, 2018).

Penulis berargumentasi bahwa pemberdayaan di Afghanistan serta untuk mendorong kesetaraan gender di tanah tersebut memerlukan usaha maksimal dari berbagai pihak. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya tantangan yang terjadi di Afghanistan mulai dari akses ke beberapa bidang serta stigma bahwa perempuan merupakan beban bagi keluarga karena tidak dapat menghasilkan pendapatan yang berbeda dari laki-laki. Masih banyak peran penting non-state actor seperti INGO yaitu UN Women melalui strategi pembangunan yang mereka miliki penting untuk membangun negara-negara yang mengalami ketertinggalan. INGO juga dianggap sebagai bukti kesadaran dari feminis secara global untuk melakukan penyadaran pada seluruh masyarakat dunia bahwa masih banyak kaum perempuan yang dirugikan. Upaya-upaya yang dilakukan merupakan upaya dari perjuangan bersama solidaritas komunitas internasional. (Septiadi, 2019).

INGO memberikan wadah bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan dan kebebasan dalam melakukan pembangunan melalui kegiatan lokal mandiri. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan wujud dari pemberdayaan

perempuan di tanah Afghanistan yang di implementasikan dalam program-program pemberdayaan seperti pembangunan usaha, pelatihan dan pendidikan serta kesehatan. Program-program tersebut merupakan bukti nyata perhatian UN Women terhadap kaum perempuan dunia termasuk Afghanistan melalui *Women for Women International*.

Conclusion

Tulisan ini dibuat atas keprihatinan terhadap isu keamanan yang terjadi di Afghanistan. Perempuan mengalami tindakan kekerasan dan perlakuan kurang baik dari pemerintah bahkan kebijakan dan aturan lokal yang berlaku. Aturan-aturan bahkan budaya lokal menjadi faktor penghambat kemajuan di Afghanistan terutama kemajuan berpikir dari kaum perempuan. Stigmatisasi terhadap perempuan sebagai makhluk rendah seringkali terjadi bahkan menyentuh ranah keluarga.

Melalui konsep feminisme. Penulis mencoba memusatkan perhatian pada pengembangan perempuan karena kaum feminisme meyakini bahwa perempuan telah banyak menderita dan mengalami perlakuan yang tidak setara. Hal tersebut karena dominasi laki-laki membuat perempuan di tanah tersebut menderita dan mendapatkan perlakuan yang tidak setara.

Penderitaan tersebut terjadi di berbagai bidang termasuk kesehatan di mana ibu yang mengandung tidak memiliki akses baik terhadap fasilitas persalinan serta tidak mendapatkan akses vaksinasi. Pelayanan buruk juga ditampilkan melalui Gedung-gedung kesehatan yang tidak terurus.

Di bidang pendidikan, perempuan di Afghanistan tidak memiliki akses baik terhadap pendidikan akibat dari keterbatasan mereka untuk hadir di tengah-tengah publik. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada aspek pekerjaannya. Perempuan Afghanistan sangat kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan serta menduduki bangku di pemerintahan.

Maka hadirnya UN Women melalui program-program yang dimiliki setelah melakukan kerja sama dengan pemerintah sejak tahun 2010. Lembaga tersebut terus mendorong perempuan Afghanistan untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses-akses strategis dalam upaya membangun negara Afghanistan. UN Women memberikan kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di ruang publik. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan status perempuan. UN Women juga diharapkan mampu mengubah pemikiran konvensional yang

termaktub dalam beberapa aturan yang membatasi masyarakat khususnya perempuan agar menjadi lebih terbuka dan menerima diskusi dari luar.

Penulis meyakini bahwa dengan strategi pembangunan dan prinsip keterbukaan. Afghanistan mampu keluar dari jalan buntu akibat konflik yang terjadi di tanah tersebut. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga internasional diharapkan dapat mendorong kesetaraan terhadap perempuan serta peningkatan pelayanan pada seluruh masyarakat nasional. Dalam hal ini, gerakan feminis melalui lembaga internasional dapat dikatakan efektif dalam melakukan perubahan yang dilakukan di Afghanistan.

Reference

1. Buku

Caballero, & Anthony, M. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. London: SAGE Publications Ltd.

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations (5th ed.)*. United Kingdom: Oxford University Press.

Sjoberg, L. (2016). *International Relations Theories: Discipline and Diversity (4th ed.)*. United Kingdom: Oxford University Press.

William, P. D. (2008). *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge.

2. Jurnal

Martin, A. (2021). REINTERPRETASI STUDI KEAMANAN DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Publikasi Ilmiah Unhawas*, 1-10.

Mulya, L. H., & Soetjipto, A. W. (2021). Maskulinitas sebagai Tonggak Keempat dalam Kajian. *Indonesian Perspective Vol. 6, No. 2*, 222-235.

Nurfahirah, A., Dewi, T., Yulinda, D. G., & Dini. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *JURNAL TRANSBORDERS / Vol. 5 No. 2*, 102-114.

Nurfahirah, A., Dewi, Y. T., & Gustiana, D. D. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *JURNAL TRANSBORDERS / Vol. 5 No. 2*, 102-114.

Peterson, V. S. (1998). Feminisms and International Relations. *Gender & History, Vol.10 No.3*, 581-589.

Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. (2018). MENGAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASANTERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAANGENDER MELALUI PERSPEKTIF FEMINISME. *urnal Asia Pacific Studies*, 145-160.

Rumadul, F. A. (2017). PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI

AFGHANISTAN. *Global Political Studies Journal Vol. 1 No. 1*, 63-78.

Septiadi, G. A. (2019). Strategi Women for WomenInternational (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan. *Frequency of International Relations Vol 1 (1)*, 122-157.

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2018). *International Relations Theory 5th Edition*. England: Pearson. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 145-160. dalam jurnal Ma'sumah 2018